



Fakta tentang **PENYANDANG DISABILITAS** dan **PEKERJA ANAK**

Masih sedikit penelitian yang menelaah kaitan antara penyandang disabilitas dan pekerja anak. Pandangan pembuat kebijakan mengenai permasalahan ini, cenderung terbentuk dari temuan-temuan non-empiris. Lembar fakta ini mencoba untuk meringkas data yang tersedia, dan menyediakan ikhtisar tentang persoalan ini baik dari perspektif global maupun dalam konteks Indonesia khususnya. Lembar fakta ini tersusun menjadi tiga bagian: **bagian I** mendefinisikan istilah-istilah terkait; **bagian II** memberikan latar belakang kuantitatif, menyajikan angka-angka global dan khususnya angka-angka yang ada di Indonesia tentang penyandang disabilitas dan pekerja anak; sementara **bagian III** melihat secara khusus kaitan antara kedua isu tersebut.

I. TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN PEKERJA ANAK

Konvensi PBB tahun 2006 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities /UNCRPD) memperkenalkan pendekatan 'sosial' terkait definisi disabilitas dan penyandang disabilitas, yaitu "...kondisi – kondisi yang timbul dari interaksi antara penyandang disabilitas dan hambatan sikap maupun lingkungan yang menghalangi peran serta penuh dan efektif mereka dalam masyarakat secara setara"¹. UNCRPD menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas harus menikmati hak-hak yang sama dengan

individual yang bukan penyandang disabilitas, dan menekankan bahwa masyarakat harus menjunjung prinsip pemenuhan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) atas kebutuhan-kebutuhan mereka, guna menjamin partisipasi mereka secara maksimal.

Program Penghapusan Pekerja Anak Internasional (*International Programme on the Elimination of Child Labour/IPEC*) dari kantor ILO menjabarkan **pekerja anak (child labour)** sebagai "anak – anak yang terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan mereka secara mental, fisik, sosial dan moral serta dapat menyakiti mereka; Pekerjaan tersebut juga dapat membahayakan pendidikan mereka (termasuk mengurangi kesempatan anak untuk bisa bersekolah,

¹ Preamble, UNCRPD, 2006

mengharuskan anak untuk meninggalkan sekolah lebih awal dan mengharuskan anak agar berusaha menggabungkan kehadiran mereka disekolah dengan pekerjaan yang berat dan dalam waktu yang panjang)”².

II. ISU DALAM ANGKA

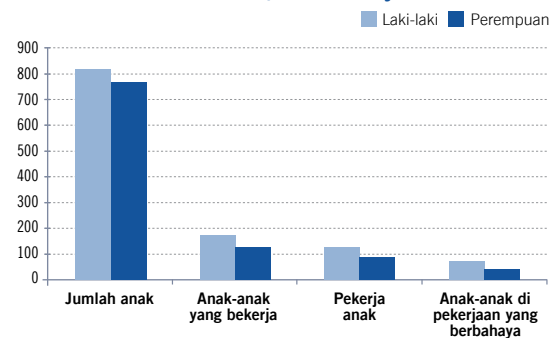
Penyandang Disabilitas, Pendidikan dan Pekerja Anak di Tingkat Global

UNICEF memperkirakan bahwa sedikitnya ada 150 juta anak penyandang disabilitas³, sementara WHO dan Bank Dunia memperkirakan jumlah anak usia 0-14 tahun dengan tingkat “disabilitas sedang atau berat” mencapai 93 juta jiwa, dimana 13 juta anak diantaranya, menyandang disabilitas berat. Jumlah anak laki-laki penyandang disabilitas lebih besar daripada anak perempuan, yang mungkin menyiratkan bahwa bayi perempuan dengan disabilitas, berpeluang lebih kecil untuk dapat bertahan hidup. Sekitar 80 persen penyandang disabilitas banyak terdapat di negara-negara berkembang, di mana mereka merupakan bagian dari 15 hingga 20 persen masyarakat miskin⁴.

Jumlah anak-anak kelompok usia 5-17 tahun yang diklasifikasikan ‘bekerja’ adalah 306 juta anak **secara global**. Dari total jumlah tersebut, 70 persennya atau sekitar 215 juta anak, merupakan pekerja anak⁵.

Analisis terhadap tren global⁶ menunjukkan bahwa kasus pekerja anak mengalami penurunan (-3.2 persen antara tahun 2004 dan 2008), terutama di Asia dan Pasifik, yang meskipun demikian tetap menjadi wilayah dengan angka absolut pekerja anak terbesar. Kebanyakan pekerja anak di wilayah ini masih terus

Perkiraan Global, dalam juta



Sumber: ILO, Mempercepat Tindakan Penghapusan Pekerja Anak/ Accelerating Action against Child Labour, Geneva, 2010.

bekerja dalam sektor pertanian, dan mayoritas dari mereka, melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan upah.

Penyandang Disabilitas, Pendidikan dan Pekerja Anak di Indonesia

Survei Sosial–Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2006 mengindikasikan bahwa 3 juta orang, atau 1,4 persen dari total populasi penduduk, hidup dengan disabilitas. Perbedaan angka disabilitas di Indonesia dan angka global menunjukkan kurang terwakilinya penyandang disabilitas di negara ini. Menurut angka perkiraan terbaru (WHO, 2005), jumlah anak penyandang disabilitas di Indonesia adalah 1,5 juta⁷. Sebuah kajian Bank Dunia tahun 2005, yang menggunakan survei rumah tangga untuk meneliti hubungan antara disabilitas dengan status ekonomi rumah tangga, mendapati bahwa insiden disabilitas tampaknya lebih tinggi di kelompok paling miskin dalam suatu populasi penduduk.

Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar. Namun demikian, menurut laporan WHO dan Bank Dunia⁸ anak-anak

² Definisi pekerja anak menurut ILO IPEC, <http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm>

³ UNICEF, *The state of the world's children 2006: excluded and invisible*, New York, 2005

⁴ World Bank, *Poverty and disability: a survey of the literature*, Social Protection Discussion Paper, Washington, 1999.

⁵ ILO, *Accelerating action against child labour*, Geneva, 2010

⁶ Ibid.

⁷ ILO – EAST Project, *Disability, access to education and child labour: exploring the links*, Jakarta, 2010

⁸ WHO and World Bank, *World Report on Disability*, 2011

penyandang disabilitas di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang sama seperti yang dimiliki oleh anak-anak yang bukan penyandang disabilitas. Kesenjangan tingkat partisipasi sekolah antara anak penyandang disabilitas dengan anak-anak lainnya mencapai 60 persen.

Prevalensi Penyandang Disabilitas, usia 6-17 tahun

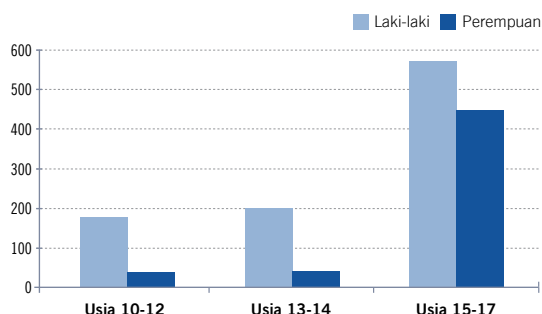
	Kelompok termiskin	Kelompok ke 2	Kelompok ke 3	Kelompok ke 4	Kelompok terkaya
Indonesia 2003*	0.70	0.55	0.41	0.50	0.38

*Survei ini termasuk penyandang disabilitas penglihatan, pendengaran, wicara dan fisik

Sumber: Bank Dunia, *Disabilitas, kemiskinan dan Sekolah di Negara-negara sedang berkembang: Hasil dari 11 Survei Rumah tangga*, Social Protection Discussion Paper, Washington, 2005.

Secara tradisional, jumlah pekerja anak di **Indonesia** lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah di negara-negara Asia dan Pasifik lainnya⁹, terutama bila dibandingkan dengan Asia Selatan. Namun demikian, pada tahun 2009, negara ini diperkirakan memiliki 1,7 juta pekerja anak usia 5-17¹⁰, rentang usia yang menjadi acuan Survei Pekerja Anak.

Pekerja Anak di Indonesia menurut kelompok usia, dalam ribuan



Sumber: Survei Pekerja Anak Indonesia, 2009

III. KAITAN ANTARA PENYANDANG DISABILITAS DAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Kaitan antara penyandang disabilitas dan pekerja anak merupakan hal yang kompleks untuk diteliti. Bukti-bukti yang ada tidak memberikan jawaban selaras satu sama lain mengenai hubungan sebab akibatnya. Hidup dengan disabilitas sering kali berarti bahwa seorang anak lebih rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi, termasuk hak atas pendidikan atau layanan kesehatan. Pertanyaannya adalah apakah disabilitas membuat seorang anak lebih rentan terjerumus dalam pekerja anak juga? Beberapa hipotesa sudah dicermati dalam berbagai penelitian mengenai hal ini.

Hipotesa pertama mengenai kaitan antara disabilitas dengan pekerja anak yang banyak diterima, umumnya bersifat satu arah, yaitu keterlibatan dalam pekerja anaklah yang mengakibatkan adanya **risiko bagi anak akan terjadinya disabilitas karena terpapar pekerjaan berbahaya**. Menurut Konvensi ILO No. 182, terlibat menjadi pekerja anak akan 'berbahaya' jika *'sifat dan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak'*¹¹. Pekerjaan seperti itu, di dalam kondisi kerja yang berbahaya atau tidak sehat dapat mengakibatkan cedera, kesehatan yang buruk, dan cacat tetap.

Akan tetapi, hipotesa kedua mengenai **keterkaitan dua hal tersebut yang lebih kontroversial lagi, bersifat kebalikannya bahwa disabilitas dapat mengakibatkan anak rentan terjerumus menjadi pekerja anak**. Meneliti korelasi ini merupakan suatu tantangan. Ada beberapa faktor tambahan yang ikut bermain dan efeknya tidak mudah diuraikan. Lebih dari itu, variabel-variabel yang berkaitan dengan

⁹ ILO – EAST Project, *Disability, Access to Education and Child Labour: exploring the links*, Jakarta, 2010

¹⁰ Survei Pekerja Anak Indonesia tahun 2009

¹¹ Konvensi ILO mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No.182)

kemiskinan berasosiasi erat dengan disabilitas dan pekerja anak, karena mereka adalah penyebab dan sekaligus akibat dari kemiskinan¹². Penelitian lebih lanjut juga terkendala oleh kurangnya data dan sulitnya survei rumah tangga untuk dapat menangkap adanya disabilitas, karena keluarga-keluarga seringkali menyembunyikan disabilitas sebagai akibat ketakutan akan stigma dan malu.

Sebuah sarana yang bermanfaat untuk menganalisa keterkaitan antara disabilitas dan pekerja anak adalah pendidikan. Mengingat perannya sebagai intervensi utama dalam penghapusan pekerja anak, pendidikan sering dipandang pada implikasinya bagi anak dan pekerjaan. Sebagai contoh, dalam statistik pekerja anak, indikator-indikator untuk pendidikan dasar universal berfungsi sebagai gambaran untuk mengukur variasi-variasi dalam perburuan anak¹³. Anak-anak yang tidak bersekolah kemungkinan besar akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk memperoleh pendapatan dan dalam pekerja anak. Bukti dari Indonesia menunjukkan bahwa putus sekolah sering terkait dengan kendala-kendala keuangan¹⁴ dan kebutuhan agar anak ikut membantu mendapatkan penghasilan bagi rumah tangga¹⁵. Selain itu, sebagai akibat dari putus sekolah, anak-anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh berbagai keterampilan guna membuka pintu peluang memperoleh pekerjaan yang layak di masa mendatang.

Disabilitas merupakan faktor kuat yang menghalangi anak untuk dapat mengikuti pendidikan. Stigma dan ketidaktahuan masyarakat sering mendorong orang tua untuk mengurung anak penyandang disabilitas di rumah. Bila sumber daya rumah tangga itu terbatas, orang tua mungkin hanya akan memberikan pendidikan kepada anak-anak bukan penyandang

disabilitas, berlandaskan keyakinan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk dapat membantu saudara mereka yang memiliki disabilitas di masa depan¹⁶. Sebagai akibatnya, anak-anak penyandang disabilitas cenderung memperoleh pendidikan yang relatif lebih sedikit. UNESCO memperkirakan bahwa sepertiga dari 75 juta anak di seluruh dunia yang tidak bersekolah adalah penyandang disabilitas¹⁷. Kemungkinan se-orang anak usia 6-11 tahun dengan disabilitas untuk bersekolah hanyalah setengah dari anak tanpa disabilitas¹⁸. Dalam konteks Indonesia, meskipun pemerintah sudah mengupayakan pendidikan yang inklusif, tingkat partisipasi sekolah dasar dari anak-anak penyandang disabilitas masih sekitar 60 persen¹⁹ lebih rendah dibanding dengan anak-anak tanpa disabilitas.

Bagi anak-anak penyandang disabilitas yang bersekolah, sistem dan infrastruktur pendidikan dapat memperparah marginalisasi. Akses fisik ke gedung sekolah mungkin tidak memadai, kurikulum dan pedagoginya tidak tepat, mungkin ada hambatan-hambatan sikap dan guru mungkin kurang terlatih untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan unik dari, maupun kebutuhan akan sarana pendukung bagi siswa penyandang disabilitas. Beberapa anak dengan disabilitas mungkin merasa sekolah itu bising, membingungkan dan mengancam²⁰. Lingkungan pendidikan non-inklusif akan meningkatkan, alih-alih menurunkan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh anak-anak penyandang disabilitas, oleh karenanya makin memperburuk marginalisasi sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk terlibat secara utuh sesuai dengan kemampuannya²¹.

Meskipun memiliki peluang lebih rendah untuk bersekolah, anak-anak penyandang disabilitas

¹² Korelasi antara disabilitas dan kemiskinan bekerja di kedua arah. Sebagaimana dikemukakan oleh kebijakan singkat ini, penyandang disabilitas seringkali disertai dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan akibatnya, keterampilan rendah dan berkurangnya kesempatan untuk mencari pekerjaan. Hidup dengan disabilitas juga berarti menghadapi biaya tambahan, seperti perawatan kesehatan. Di sisi lain, kemiskinan dapat menyebabkan disabilitas melalui beberapa faktor seperti kekurangan gizi, ketidakmampuan untuk mendapatkan akses ke perawatan kesehatan, atau keterlibatan pekerja anak.

¹³ ILO, *Accelerating action against child labour*, Geneva, 2010

¹⁴ ILO-IPEC, *Indonesia's Youth Labour Market and the Impact of Early School Drop Out and Child Labour*, 2006

¹⁵ ILO-EAST, *Equivalency Education and Access to Decent Work*, Jakarta, 2010

¹⁶ N E Groce, *Adolescents and youth with disability: Issues and challenges*, Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, Vol.15 No.2, 2004, pp.13-32

¹⁷ UNESCO, *Global Monitoring Report on Education for All*, 2010

¹⁸ UNESCO, *Global Monitoring Report on Education for All*, 2008 study of 20 developing countries

¹⁹ UNESCO, *Global Monitoring Report on Education For All*, 2010

²⁰ Ibid.

²¹ Referensi pasal 24 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Education, <http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>

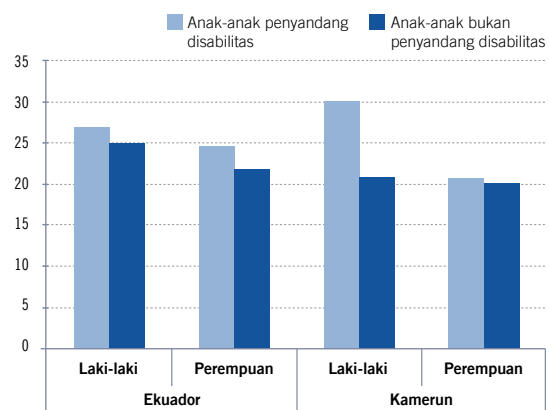
tampaknya tidak secara sistematis lebih rentan menjadi pekerja anak. Sebuah kajian cepat kualitatif²² yang baru-baru ini dilakukan oleh ILO-EAST di kota Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Indonesia menemukan bahwa kebanyakan anak penyandang disabilitas dan tidak bersekolah yang diwawancarai tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk memperoleh pendapatan. Mereka juga tidak ditemukan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Justru sebaliknya, mereka kebanyakan 'idle/tidak melakukan kegiatan apapun'. Meskipun disabilitas menjadi faktor kerentanan bagi anak untuk memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pendidikan di sekolah, temuan-temuan ini menyiratkan bahwa disabilitas, dalam beberapa kasus, bisa menjadi faktor 'pelindung' dalam kaitannya dengan pekerja anak (sebagai akibat disabilitas).

Analisa terhadap kaitan isu pekerja anak dengan pendidikan seringkali didasarkan pada asumsi bahwa keluarga miskin akan memaksimalkan pemanfaatan modal kerja yang ada pada mereka; tetapi, bukti dari survei pekerja anak menunjukkan bahwa (a) kadang-kadang banyak anak-anak tidak bersekolah dan tidak pula bekerja (b) fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan keterlibatan anak-anak dalam tugas-tugas rumah tangga, atau ketidaktersediaan pekerjaan²³. Kajian cepat yang dilakukan oleh ILO-EAST di Indonesia menunjukkan bahwa dalam kasus anak-anak penyandang disabilitas, keprihatinan orangtua untuk melindungi anaknya memainkan peranan penting dalam keputusan untuk tidak mempekerjakan mereka.

Akan tetapi, bukti dari penelitian-penelitian lain mengarah pada kesimpulan yang berbeda. Sebuah *Working paper* dari ILO-IPEC²⁴, yang mengambil perspektif lebih global, mengatakan bahwa disabilitas bisa menjadi faktor 'pendorong' bagi anak untuk masuk menjadi pekerja anak. Temuan-temuan makalah tersebut didasarkan pada data survei pekerja

anak yang dilaksanakan dengan dukungan ILO-IPEC - Program Monitoring dan Informasi Statistik tentang Pekerja anak/*Statistical Information and Monitoring Programme on Child Labour* (SIMPOC) di Kamerun dan Ekuador. Bukti yang di dapat dari penelitian ini mendukung kecenderungan bahwa anak-anak penyandang disabilitas cenderung 'idle', tetapi juga sekaligus menunjukkan bahwa 'idle' total hanya terjadi pada beberapa individu penyandang disabilitas dengan persentase yang relatif kecil. Lebih sering terjadi, anak-anak penyandang disabilitas ditemukan terlibat secara substansial dalam kegiatan-kegiatan produktif. Dalam beberapa konteks, mereka justru lebih cenderung bekerja daripada anak-anak bukan penyandang disabilitas²⁵.

Jam kerja rata-rata per minggu, menurut jenis kelamin dan status disabilitas, kelompok usia 5-17 tahun, dalam %



Sumber: ILO-IPEC, *Working paper on Descriptive Evidence on Child Labour and Disabilities*, Geneva, 2010

KERANGKA KERJA HUKUM DAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

Mengenai Disabilitas

Pemerintah Indonesia sudah mengambil berbagai inisiatif terkait perlindungan **hak-hak penyandang disabilitas** dan mempromosikan lingkungan yang inklusif:

- **1997:** Undang-undang Penyandang Cacat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4.

²² ILO – EAST Project, *Disability, access to education and child labour: exploring the links*, Jakarta, 2010

²³ UCW, The puzzle of "idle" children: neither in school nor performing economic activity. Evidence from six countries, October 2003

²⁴ ILO-IPEC, *Working Paper on Descriptive Evidence on Child Labour and Disabilities*, Geneva, 2010

²⁵ There are however methodological issues with this study that does not differentiate disability and illness

- **2007:** Menandatangani Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- **2004-2013:** Rencana Aksi Nasional untuk Langkah Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat Indonesia Mengenai Pekerja Anak
- **1999:** Ratifikasi Konvensi ILO mengenai *Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja*, 1973 (No.138).
- **2000:** Negara Asia pertama yang meratifikasi Konvensi ILO mengenai *Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak*, 1999 (No.182).

Pendidikan Inklusif

- **2003 *Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional:*** menetapkan bahwa anak-anak usia wajib sekolah dan dengan kebutuhan khusus menerima ‘perhatian yang sama’ dari pemerintah. Beberapa tahun belakangan, hal ini diwujudkan dengan didirikannya 2.230 sekolah pendidikan khusus baru. Hingga 2007, telah dibangun 9.999 ‘tempat belajar’ bagi anak-anak dengan disabilitas di seluruh provinsi, dikelola oleh 2.574 sekolah. Secara keseluruhan, pada tahun 2007, lebih dari 327.326 siswa siswi penyandang disabilitas memperoleh manfaat dari tempat-tempat ini.
- **2007-2015 *Program Conditional Cash Transfer (Program Keluarga Harapan)*** aktif di 118 kabupaten dan 25 provinsi (pada tahun 2011). Keluarga-keluarga yang bersedia anak-anak mereka diintegrasikan kembali ke sekolah, menerima bantuan sejumlah USD 45 sampai 90 per tahun, tergantung pada jumlah anak dan nilai mereka.

Bukti-bukti yang tidak seragam ini menyiratkan bahwa kaitan antara penyandang disabilitas dan pekerja anak terjadi sesuai dengan konteks spesifik masing-masing. Di mana sikap terhadap isu disabilitas sangat negatif, orang tua akan lebih cenderung menyembunyikan anak-anak penyandang

disabilitas dari masyarakat umum. Dalam kasus ini, disabilitas bisa berfungsi sebagai faktor pelindung dari terlibatnya anak menjadi pekerja anak. Sentimen lokal terhadap kegiatan mengemis, yang merupakan akibat lazim dari disabilitas dan kemiskinan, juga dapat membatasi insiden pekerja anak di kalangan anak-anak penyandang disabilitas²⁶. Namun demikian, seperti diperlihatkan pada bagan di atas ini, dalam konteks lain, di mana sikap yang berbeda mungkin berpengaruh, dan ketika tekanan ekonomi meningkat, maka hidup dengan disabilitas dapat mengakibatkan anak jauh lebih rentan terhadap eksploitasi dan waktu kerja yang panjang.

REKOMENDASI

Program-program untuk penghapusan pekerja anak dan anak-anak penyandang disabilitas perlu diintegrasikan secara lebih baik, khususnya dengan:

- Memasukkan disabilitas sebagai salah satu dimensi survei pekerja anak, bersama dengan status pendidikan, status kerja, dan keterlibatan dalam tugas-tugas rumah tangga;
- Mengupayakan pendekatan holistik untuk pendidikan yang inklusif dengan memfasilitasi partisipasi yang bermakna dari anak-anak dengan disabilitas, dan anak-anak yang rentan terhadap pekerja anak, di dalam proses belajar;
- Mengutamakan usaha-usaha untuk menarik anak-anak dari pekerjaan berbahaya guna mencegah kecelakaan/sakit yang dapat mengakibatkan disabilitas;
- Memaksimalkan kapasitas pembelajaran (sekolah dan kejuruan) dari anak-anak dengan disabilitas sekaligus memperkuat kebijakan, tindakan dan sistem yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan bahwa keterampilan baru yang mereka dapatkan akan menjadikan mereka rentan pada eksploitasi.

²⁶ ILO – EAST Project, Disability, access to education and child labour: exploring the links, Jakarta, 2010